

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTA BANGUN SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Isransyah¹

Abstrak

Muhammad Isransyah, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah bimbingan bapak Drs. Daud Kondorura, M,Si dan bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Inisiatif Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan, Tanggung Jawab kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan, Hubungan Kepala Desa dengan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan dan Motivasi dalam menggerakkan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan adanya sikap inisiatif, tanggung jawab, hubungan maupun motivasi yang di lakukan kepala Desa di Desa Kota Bangun Seberang.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Kepala Desa, Pembangunan*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammadisransyah@yahoo.com

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 butir kedua, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 1 butir ketiga, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 butir kelima, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi dan implikasi yang cukup besar terhadap perubahan paradigma Pembangunan Daerah. Dengan dilaksanakan Otonomi Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat secara mandiri mengurus rumahtangganya sendiri, baik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana untuk merealisasikan hal tersebut, perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan pemerintahan ditingkat paling bawah yakni Desa dan Kelurahan.

Kepala Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan demikian desa menjadi gerbang terdepan dalam mengapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Dengan diberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa selaku aparat pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desanya harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung yang di embannya.

Masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat luas dan menyangkut bidang yang sangat luas dan memainkan peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, dan dalam suatu organisasi, bahkan dalam kehidupan sehari – hari. Dalam setiap masyarakat timbul dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya, yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil dan golongan yang besar, tanpa adanya seorang pemimpin maka tujuan suatu

organisasi yang dibuat tidak akan ada artinya karena tidak ada yang bertindak sebagai penyatu terhadap berbagai kepentingan.

Menurut Siagian (2002:22) dalam bukunya yang berjudul organisasi kepemimpinan dan perilaku organisasi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang menduduki jabatan atau sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dengan melalui perilaku yang positif untuk memberikan sumbangsih yang nyata dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.

Jika melihat perkembangan berbagai teori mengenai kepemimpinan yang ada, maka timbul suatu kesadaran bahwa perkembangan teori kepemimpinan itu telah berkembang sedemikian pesat sejalan dengan perkembangan kehidupan yang ada, kepemimpinan tidak lagi di pandang sebagai penunjuk jalan namun sebagai patner yang bersama - sama dengan anggota berusaha untuk mencapai tujuan.

Seiring dari pada itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan arus globalisasi, maka dituntut pula adanya sumber daya pegawai yang handal di bidangnya dan pegawai yang dapat bekerja secara efisien, efektif, produktif, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak kadaluarsa yang pada akhirnya mampu menampilkan kinerja yang memuaskan.

Namun di sisi lain bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup mendasar terutama dengan berakhirnya rezim orde baru dan munculnya reformasi didalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah dibidang perundang - undangan, diantaranya Undang - undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-undang No 32 Tahun 2004 merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah.

Sehingga dalam kepemimpinan dibutuhkan misi karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada misi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat atau proses untuk membujuk orang lain bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas - aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Sebagai aparat pelaksana tugas, selayaknya seorang Kepala Desa dapat melakukan perencanaan, pergerakan, dan pengawasan terhadap organisasi maupun kegiatan masyarakat. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. Salah satu faktor yang turut serta menentukan keberhasilan dalam mengerjakan Pembangunan Desa adalah kepemimpinan seorang Kepala Desa. Kepala Desa

diharapkan dapat memberikan inisiatif, inofasi, motifasi dan tanggung jawab yang baik dalam menggerakkan pembangunan desa agar dapat meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Seorang pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja pemerintahan yang dijalankannya terlebih ditengah pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, maka hal yang paling menentukan adalah sikap profesionalitas dari aparatur pemerintahan. Khususnya pejabat yang memimpin lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Seorang figur Kepala Desa (pemimpin) diharapkan dapat mewujudkan peubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagai aparat ia dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan dan raga kebutuhan publik. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan kedudukan tersebut, Kepala Desa dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi pemerintahan Desa. Keberhasilan dalam menggerakkan pembangunan desa sangat tergantung pada kepemimpinan kepala Desa itu sendiri.

Melihat kondisi saat ini kepemimpinan Kepala Desa pada Kota Bangun Seberang masih belum maksimal, kondisi ini di ketahui dari beberapa indikator seperti pelaksanaan pembangunan baik dibidang infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan penyebrangan pery dan sebagainya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

Oleh karena itu faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pimpinan formal di Desa dan Mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang bersangkutan didalam mempengaruhi dan mengarahakan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin inilah lahir kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda “pemimpin” yaitu orang-orang yang berfungsi membimbing atau menuntun.

Menurut pendapat Moekijat (1996) ada tiga pengertian pemimpin:

- 1) pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan atau menjuruskan orang lain.
- 2) pemimpin adalah seseorang yang dapat menggerakkan orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- 3) pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan ikut bertanggung jawab kepada bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinannya.

Suganda (1986) menyatakan bahwa pemimpin biasanya diartikan sebagai orang yang mempunyai tugas untuk mngarahkan dan membimbing bawhan, dan mampu memperoleh dukungan bawahan hingga dapat mengerakan mereka kea rah pencapaian tujuan organisasi.

Jadi seseorang pemandu dan penuntun yang membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain sehingga menimbulkan perasaan ikut serta dan bertanggung jawab bawahannya terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinannya.

Menurut Hasibuan (2005:43) Pemimpin adalah Seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan atau dengan kata lain Kepemimpinan adalah Suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi Kepemimpinan

Rifai (2006:53) mejelaskan Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi :

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi

(Rifai, 2006:54-55) Secara oprasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

- a) Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di

mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi agar orang lain agar mau melaksanakan perintah.

b) Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinya yang dinilai mempunyai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (*feed back*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah mengintruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

c) Fungsi Partisipasi.

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara kendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan buka pelaksana.

d) Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi

e) Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut :

- a) Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja.
- b) Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas.
- c) Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat.

- d) Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis
 - e) Pemimpin harus bisa memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.
 - f) Pemimpin harus berusaha menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab.
 - g) Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.
- Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan desa dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Selanjutnya Penulis akan menguraikan tentang pembangunan yang dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini di kaitkan dengan jumlah pembangunan fisik dan non fisik. Proses pelaksanaan pembangunan Desa adalah untuk meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, diperlukannya adanya partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pembangunan tersebut.

Dalam proses pembangunan Desa dikatakan bahwa pembangunan meliputi aspek fisik dan non fisik. Yaitu dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang berupa perwujudan dan dapat dilihat dengan nyata. Jadi pembangunan yang berwujudan yaitu:

1. Pembangunan sarana jalan.
2. pembangunan tempat peribadahan.
3. pembangunan sarana pendidikan.
4. pembangunan gedung serba guna.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang diarahkan pada perubahan sikap mental anggota masyarakat yang dapat menerima perubahan keadaan. Jadi pembangunan non fisik adalah:

1. Kegiatan keagamaan.
2. Kegiatan pendidikan dan kesejahteraan keluarga.
3. Kegiatan keluarga berencana.

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa, untuk meningkatkan pembangunan didesa maka hal ini merupakan tugas yang sangat luas ruang lingkupnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sasaran pembangunan didesa tidak lain adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan dan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan. Pada hakekatnya pembangunan itu merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tujuan pokok pembangunan itu harus memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah

bagi masyarakatnya, karena kedudukannya desa merupakan dasar dan landasan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan di desa tidak lain adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan dan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan. Pada hakekatnya pembangunan itu merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tujuan pokok pembangunan itu harus memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya, karena kedudukan desa merupakan dasar dan landasan bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Dalam hal pembangunan ini tentu melalui proses pendapatan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yaitu :

1. Tujuan jangka pendek untuk meningkatkan taraf pengidupan dan kehidupan rakyat khususnya desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi yang baru.
2. Tujuan jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila yang ridahi Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pembangunan itu harus dilaksanakan dengan berasaskan kepada missal berarti pembangunan desa harus meliputi seluruh masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah. Sedangkan integral berarti pembangunan kelurahan harus meliputi seluruh masyarakat pembangunan disegala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat, yaitu baik dibidang ekonomi, sosial kebudayaan, mental, spritual dan sebagiannya.

Menurut Suryono (2001:26) pengertian pembangunan dilihat dari dua aspek penting yaitu secara Etimologik dan secara Ensiklopedik.

Secara Etimologik, Istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awal pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata pembangunan mengandung empat pengertian, yaitu :

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi)
2. Bangun dalam arti bangkit/berdiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi)
4. Bangun dalam arti kata kerja, membuat, mendirikan, ,pembina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, aspek bentuk)

Secara Ensiklopedik kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep –konsep: pertumbuhan (*growth*), rekunstruksi (*reconstuction*), modenisasi (*modernization*), pembangunan social (*social development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*contructionan*).

Berdasarkan dua aspek dia atas, suryono menyimpulkan pembangunan adalah upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menepatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek untuk mampu mengembangkan dan memperdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan dinamis, sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Menurut Effendi (2002:09) mengemukakan bahwa “pembangunan suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.

Sedangkan menurut Siagian (2002:22) mengatakan bahwa pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah :

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :

- 1) Inisiatif Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan
- 2) Tanggung Jawab kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan
- 3) Hubungan Kepala Desa dengan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan.
- 4) Motivasi dalam menggerakkan pembangunan

Jenis dan sumber data

Sumber data adalah objek dimana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Disini yang menjadi sumber data adalah informan. Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup, dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi Kepada Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

Selanjutnya untuk menentukan sample atau informan dilakukan dengan metode *snowball sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.

Dengan kata lain, bila mana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari

informasi karena dianggap selesai. Dengan demikian pada penelitian kualitatif ini tidak dipersoalkan jumlah sample.

Jenis-jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang diperoleh melalui informan antara lain:

- a. Dokumen-dokumen
- b. Buku-buku referensi

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Pembangunan Di Desa Kota Bangun Seberang, dalam mempengaruhi perilaku manusia sebagai aktor intelektual yang menjadi panutan di segala bidang bagi masyarakat yang dipimpinnya untuk menghasilkan kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kepala Desa mempunyai tugas dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Inisiatif, Tanggung Jawab, Hubungan kepala Desa dan motivasi Kepala Desa dalam Menggerakkan Pembangunan, agar suatu pembangunan dapat terkendali serta tercapainya tujuan.

Inisiatif Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa inisiatif yang diberikan Kepala Desa sebagai pemimpin di Kota Bangun seberang dalam menggerakkan pembangunan, dengan cara melakukan penggerakkan pembangunan kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan kepada staf Desa serta lembaga-lembaga yang ada di Desa serta memberi penjelasan mengenai prosedur-prosedur ataupun tahap-tahap pembangunan di Desa, beliau mengundang lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM, Tokoh-tokuh masyarakat dan masyarakat agar dalam melaksanakan pembangunan dapat maksimal, melalui kegiatan musyawarah Desa.

Tanggung Jawab kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan

Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Dengan sikap

tanggung yang dimiliki seseorang, maka dapat dinilai apakah seseorang tersebut baik atau tidak. Tanggung jawab harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab terbesar untuk menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik dan buruk, benar atau salah. Menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian. Menerima hukuman jika salah melakukan sesuatu. Memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu.

Seorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa kepadanya ada *penanggung jawaban* kepemimpinan. Penanggung jawaban kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin telah diakui serta dipercayai sehingga ia menjadi pemimpin (dengan cara apa pun). Tanggung jawaban kepemimpinan ini juga menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban yang *inklusif*, yang menyeluruh atas segala dan semua dalam kepemimpinannya. Prinsip pertanggung jawaban ini menegaskan bahwa apabila ada seorang bawahan berbuat kesalahan, pemimpin harus turut menanggungnya. Hal ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki penanggung jawaban kepemimpinan, yang olehnya ia tidak dapat melarikan diri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber di Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa tanggung jawab Kepala Desa dalam kepemimpinannya dalam menggerakkan pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala Desa bertanggung jawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan di Desa. Kepala Desa dibantu oleh para Staf Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Secara langsung Kepala Desa bertanggung jawab terhadap camat. Apapun yang terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan.

Hubungan Kepala Desa dengan masyarakat dalam Menggerakkan Pembangunan

Kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Hubungan kepada Masyarakat dalam hal menggerakkan pembangunan, Kepala Desa juga harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan hubungan yang baik kepada masyarakat dari aparat desa dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya, karena untuk menciptakan keakraban desa dengan masyarakat desa harus memiliki hubungan yang baik kepada masyarakat dalam menggerakkan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Hubungan kepada

Masyarakat dalam hal menggerakkan pembangunan sudah berjalan dengan baik dengan adanya Kepala Desa menciptakan situasi dan kerjasama yang harmonis antar pemerintahan desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa serta masyarakat yang ada di desa Kota Bangun Seberang, yaitu kepala Desa juga dalam hal ini menciptakan keakraban antar aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Kota Bangun Seberang serta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat.

Motivasi dalam menggerakkan pembangunan.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan dalam memotivasi aparat Desa serta lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk meningkatkan pembangunan. Dalam artian kepala Desa Sebagai motivator dalam menggerakkan pembangunan Kepala Desa juga harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para staf di Desa dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa motivasi yang di berikan oleh Kepala Desa kepada aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa agar trjalannya hubungan yang harmonis baik antara lembaga yang ada di desa maupun pada agar suatu pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yang menjadi tujuan bersama.

Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis kemukakan pada bab - bab sebelumnya, maka berikut ini akan menyimpulkan uraian - uraian tersebut di bawah ini :

1. Inisiatif yang diberikan Kepala Desa selaku pemimpin di Kota Bangun seberang dalam menggerakkan pembangunan, dengan cara melakukan penggerakkan pembangunan kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan kepada staf Desa serta lembaga-lembaga yang ada di Desa serta memberi penjelasan mengenai prosedur-prosedur ataupun tahap-tahap pembangunan di Desa, beliau mengundang lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM, Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat agar dalam melaksanakan pembangunan dapat maksimal, melalui kegiatan musyawarah Desa.
2. Tanggung jawab Kepala Desa dalam kepemimpinannya dalam menggerakkan pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala Desa bertanggung jawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan di Desa Kepala Desa dibantu oleh para Staf Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Secara langsung Kepala Desa bertanggung jawab terhadap camat. Apapun yang terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan. Kepala Desa belum mampu dalam

menggerakkan masyarakat dilihat dari kurang adanya partisipasi masyarakat. Seperti penyampaian informasi pembangunan yang akan dilakukan.

3. Hubungan kepada Masyarakat dalam hal menggerakkan pembangunan sudah berjalan dengan baik dengan adanya Kepala Desa menciptakan situasi dan kerjasama yang harmonis antar pemerintahan desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa serta masyarakat yang ada di desa Kota Bangun Seberang, yaitu kepala Desa juga dalam hal ini menciptakan keakraban antar aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Kota Bangun Seberang serta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat.
4. Motivasi yang di berikan oleh Kepala Desa kepada aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa agar trjalannya hubungan yang harmonis baik antara lembaga yang ada di desa maupun pada agar suatu pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yang menjadi tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka berikut penulis ingin menyarankan atau mengusulkan hal-hal yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis.

1. Kepala Desa harus mempunyai perencanaan yang lebih terencana lagi sehingga kebutuhan dan tuntutan masyarakat bisa terpenuhi.
2. Kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan masyarakat perlu ditingkatkan lagi baik penggerakan kepada bawahan maupun kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar hasilnya bisa semakin terlihat.

Kepala Desa harus bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mengajak masyarakat untuk dapat hadir dalam rapat bersama pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Budiman Rusli. 2008, *Pelayanan Publik di Era Reformasi*. Jakarta
- Effendi, Bactiar, 2002. *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan Kurnia Alam Semesta*, Yogyakarta
- Gibson James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr, 1980, *Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kartono Kartini, 2006, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy.J, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Miles, Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Sutyono, Agus, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*.UM. Malang
- Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P, 2000, *Manajemen Abad 21*. Bumi Aksara. Jakarta
- 2000. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Teori Pembangunan Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, Sondang, P. 2005, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Adminitrasi, Cetakan Pertama*, PT, Gunung Agung Jakarta.
- Terry, George R. 1986. *Azas-azas Manajemen*. Bandung : PT Alumni
- Winardi, 2000. *Kepemimpin Dalam Management*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Yuwono, Teguh, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah Paradikgma Baru. Clogapps di Ponegoron Univercity*. Semarang

Dokumen

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005